



**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI  
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023 - 2024  
KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI  
TANGGAL 16 – 20 JULI 2024**

---

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja reses ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali pada tanggal 18 Juli 2024. Kegiatan kunjungan kerja ini dipimpin Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Bapak Drs. Cornelis, M.H., serta diikuti oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi.

Kunjungan kerja reses tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara utuh terhadap kondisi yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dalam pelaksanaan reforma agraria melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, penanganan akses reforma agraria dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koordinasi dan sinergi yang dilakukan dengan instansi atau pihak, serta pelayanan sertifikat tanah elektronik.

Dalam kunjungan kerja reses ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Komplek Civic Center, Jl. Sahadewa No.7, Gianyar, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, dengan Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Dwi Hariyawan S., didampingi Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Fahmi, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Gusti Putu Darma Astika beserta jajaran.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Gusti Putu Darma Astika, menjelaskan bahwa reforma agraria di Kabupaten Gianyar telah mencakup dua aspek utama: pendataan aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penataan akses dengan pendampingan kepada subjek reforma agraria. “Pada Tahun 2024 ini Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar mendapatkan target penerbitan sertifikat hak atas tanah sejumlah 2000 sertifikat yang berlokasi di seluruh desa di wilayah Kabupaten Gianyar,” ujarnya. Dengan target yang jelas dan langkah-langkah pendukung yang strategis, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Gianyar, baik dari segi kepemilikan lahan maupun pemanfaatan lahan yang produktif.

Selain itu, menurut Gusti Putu Darma Astika, pada tanggal 19 Februari 2024 Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah menerbitkan Sertipikat Elektronik melalui kegiatan Layanan Rutin baik untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pemeliharaan Data maupun

Perbaikan Data. Pada awal Juni 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar juga mulai menerbitkan Sertipikat Elektronik melalui kegiatan PTSL berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 468/SK-HARI.01/VI/2024 tentang Penerbitan Sertipikat Elektronik untuk Kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah Program Prioritas Nasional. “Jumlah Sertipikat Elektronik yang sudah terbit melalui kegiatan PTSL pada tanggal 15 Juli 2024 yaitu sebanyak 6 (enam) Sertipikat,” jelasnya.

Akhirnya, dari hasil pertemuan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan Komisi II DPR RI, yakni sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang telah mengimplementasikan layanan elektronik pertanahan dan juga menetapkan Kabupaten Gianyar sebagai Kabupaten Lengkap pada Mei tahun 2024 ini. Dengan menjadi Kabupaten Lengkap, secara spasial seluruh bidang tanah di Kabupaten Gianyar telah terpetakan dengan baik sehingga memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan ruang dan wilayah, serta memudahkan penerapan sistem elektronik dalam rangka efisiensi pelayanan pertanahan kepada masyarakat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
2. Penurunan realisasi PTSL di Kabupaten Gianyar memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Komisi II DPR meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, sehingga program PTSL dapat kembali berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat dapat tercapai. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Gianyar.
3. Terkait masalah alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gianyar yang terus meningkat untuk mendukung sektor pariwisata melalui pembangunan resort, hotel, pertokoan, pemukiman dan lainnya. Komisi II DPR RI meminta Kantor Pertanahan dan Pemda Gianyar untuk mengatur zonasi lahan secara lebih jelas untuk memastikan keseimbangan antara lahan pertanian, permukiman, dan kawasan komersial. Diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian yang tidak terencana sehingga Kabupaten Gianyar dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan serta budaya lokal.
4. Dalam hal kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Gianyar, Komisi II DPR RI meminta Kantor Pertanahan Gianyar untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepemilikan tanah oleh WNA dan memastikan bahwa aturan yang ada dijalankan dengan ketat. Kantor BPN dan Pemerintah Daerah Gianyar juga perlu berkolaborasi dalam memantau transaksi properti dan penggunaan lahan serta

mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka terkait tanah yang mencakup informasi tentang regulasi kepemilikan tanah oleh WNA dan pentingnya menjaga kearifan lokal serta keberlanjutan lingkungan.

5. Komisi II DPR RI memberikan tekanan pada pentingnya jaminan keamanan atas penerbitan sertipikat elektronik yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Dengan sertipikat elektronik yang aman dan terpercaya, serta bebas dari resiko serangan siber, perlindungan server dari akses yang tidak sah dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan digital.

Kunjungan kerja reses ini diakhiri dengan Anggota Komisi II DPR RI melihat langsung pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, termasuk proses pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat elektronik, dan pemanfaatan layanan pertanahan secara digital.

Kabupaten Gianyar, 18 Juli 2024,  
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Gianyar.